

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan infrastruktur lingkungan di kawasan perkotaan seringkali menjadi tolak ukur kualitas ruang hidup masyarakat. Di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara kebutuhan warga terhadap fasilitas lingkungan dan kemampuan pemerintah dalam menyediakannya. Masih banyak titik di RW (Rukun Warga) yang mengalami kondisi jalan lingkungan rusak, drainase tersumbat atau belum memadai, pencahayaan jalan yang kurang, serta fasilitas umum lain yang tidak terpelihara. Situasi semacam ini menimbulkan kesan bahwa pembangunan fisik belum berpihak sepenuhnya kepada warga di tingkat paling bawah, dan bahwa akses partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih sangat terbatas. (Observasi, 06-10-2025)

Secara ideal, infrastruktur lingkungan seharusnya mencakup sistem drainase yang berfungsi baik, jalan lingkungan yang layak, ruang terbuka hijau seperti taman warga, fasilitas layanan dasar seperti Posyandu yang terawat, pencahayaan jalan yang memadai, serta sistem pengelolaan air yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut tidak hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat kesehatan lingkungan,

kenyamanan sosial, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Namun, kondisi aktual di beberapa titik wilayah Kecamatan Cikole menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar ideal tersebut dan realitas lapangan. Masih ditemukan jalan lingkungan yang rusak, fasilitas Posyandu yang kurang layak, drainase tersumbat, serta minimnya ruang publik yang fungsional. Padahal secara teori dan regulasi, infrastruktur di wilayah perkotaan seharusnya terpelihara dengan baik karena dukungan pemerintah, alokasi anggaran P2RW, serta keterlibatan kelembagaan masyarakat sudah tersedia. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pembangunan partisipatif yang dirancang pemerintah dengan pelaksanaannya di tingkat RW, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa kualitas infrastruktur tidak sesuai dengan standar ideal, meskipun sumber daya finansial, kelembagaan, serta kebijakan telah disiapkan.

Dalam upaya menjembatani kesenjangan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi merancang Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Program ini bertujuan mendorong warga RW agar tidak sekadar menjadi penerima pembangunan, melainkan menjadi pelaku aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan lingkungan di wilayah mereka. Konsep P2RW menekankan bahwa masyarakat lokal berhak memiliki ruang dalam menentukan prioritas pembangunan, dan bahwa pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, bukan pengendali tunggal.

Dasar pemikiran di balik P2RW merupakan bahwa dinamika sosial, kebutuhan masyarakat yang beragam, dan kompleksitas tantangan

lingkungan hanya dapat ditanggapi secara efektif apabila masyarakat diberikan ruang luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Prinsip-prinsip demokratis, kesetaraan, dan kemitraan menjadi landasan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat top-down, melainkan harus bersifat dialogis dan kolaboratif. Pemerintah sebagai fasilitator memberikan pendampingan teknis, dukungan regulasi, serta dana hibah, sementara masyarakat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Landasan hukum P2RW juga sudah cukup jelas. Menurut Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu penerima hibah dari APBD adalah badan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Ketentuan ini diperjelas oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tahun 2015, yang menyatakan bahwa lembaga RW yang telah disahkan melalui keputusan lurah dapat menjadi penerima hibah P2RW. Dengan demikian, program ini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk dijalankan pada level RW sebagai unit paling mikro di masyarakat.

Melalui akses hibah dan dukungan institusional, P2RW tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik (seperti peningkatan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan fasilitas publik kecil) namun juga diarahkan untuk memupuk semangat kolektif, tanggung jawab bersama, dan kepedulian warga terhadap lingkungan mereka. Keberlanjutan hasil pembangunan dipertaruhkan pada sejauh mana warga benar-benar merasa

turut memiliki dan mau memeliharanya. Namun demikian, di banyak kasus, efektivitas program ini masih bervariasi bergantung kepada sejauh mana masyarakat benar-benar diberdayakan dan sejauh mana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dalam pola yang setara.

Pemilihan Kecamatan Cikole sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Daerah ini adalah salah satu kawasan yang padat penduduk dan relatif dinamis dalam aktivitas pembangunan lingkungan. Beberapa RW di Cikole menunjukkan keberhasilan program P2RW dalam peningkatan infrastruktur lingkungan, namun ada pula RW yang stagnan atau mengalami hambatan signifikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Data awal observasi menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas antar RW cukup tajam, beberapa RW memiliki pengurus yang aktif, warga yang sadar lingkungan, dan jejaring kolaboratif, sementara RW lain kurang memiliki sumber daya manusia, kesadaran kolektif, atau akses dukungan teknis.

Hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan P2RW (termasuk di Cikole) meliputi: (1) keterlambatan pencairan dana hibah, (2) kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek, (3) keterbatasan kemampuan administrasi dan teknis pengurus RW, (4) rendahnya partisipasi warga di tahap perencanaan atau evaluasi, serta (5) tingginya ekspektasi warga terhadap “bantuan pemerintah” sehingga rasa memiliki terhadap pembangunan kurang tumbuh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya juga sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan,

dan bahwa aspek fisik pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konteks partisipatif dan kapasitas masyarakat.

Dalam perspektif pemberdayaan (*empowerment*), proses pemberdayaan masyarakat bukanlah suatu aktivitas sesaat, melainkan rangkaian langkah-proses yang melibatkan peningkatan kesadaran, kapasitas, kontrol, dan partisipasi. Menurut Rappaport (1987) menegaskan “*Empowerment is viewed as a process by which people, organizations, and communities gain mastery over issues of concern to them.*” yang artinya “Pemberdayaan merupakan suatu proses di mana individu, organisasi, dan komunitas memperoleh penguasaan (kendali) atas persoalan-persoalan yang memengaruhi kehidupan mereka” (Rappaport, 1987). Konsep ini menekankan bahwa warga RW tidak hanya menjadi objek intervensi pembangunan, tetapi subjek yang memiliki kontrol dan kapasitas. Teori pemberdayaan Rappaport ini populer dalam literatur community psychology sebagai landasan konseptual dalam pengembangan program pemberdayaan (Rappaport, 1987).

Selain itu, teori pemberdayaan yang dikembangkan oleh (Ife, J. W., & Tesoriero, F., 2008) menyajikan dua dimensi penting: pemberdayaan personal (pribadi) dan pemberdayaan sosial (kolektif). Pemberdayaan personal mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, kepercayaan diri dan kesadaran asli tentang hak serta kemampuan. Sementara itu, pemberdayaan sosial berkaitan dengan kekuatan struktural, jaringan masyarakat, dan kemampuan kolektif berinteraksi dengan lembaga dan

kebijakan publik. Teori Ife & Tesoriero mendorong pendekatan di mana masyarakat memiliki peran sejajar dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penerima.

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dipilih sebagai metode penelitian karena sifatnya yang menyatukan tindakan dan refleksi dalam siklus kolaboratif antara peneliti dan masyarakat. Menurut studi *Implementation of Participatory Action Research* (PAR) dalam program pengabdian masyarakat, PAR memungkinkan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan intervensi, pelaksanaan tindakan, sampai evaluasi bersama (Afni Khafsoh et al., n.d.). Metode ini sangat cocok untuk penelitian pemberdayaan karena ia menciptakan ruang dialog, akuntabilitas bersama, dan pembelajaran kolaboratif antara warga dan peneliti. Beberapa penelitian lokal yang menerapkan PAR sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat juga menjadi acuan penting. Misalnya, penelitian *Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par: Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas* membahas penggunaan PAR dalam konteks komunitas lokal, menyoroti bahwa masyarakat tidak sekadar objek penelitian tetapi menjadi mitra aktif dalam tindakan perubahan (Siswandi, 2024).

Selain itu, penelitian ini muncul karena adanya fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan maupun evaluasi program, serta masih terlihat kesenjangan kualitas infrastruktur antar wilayah RW di Kecamatan Cikole. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk melihat

optimalisasi infrastruktur lingkungan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, di mana warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan di lingkungannya sendiri. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, serta menciptakan pemerataan kualitas infrastruktur yang lebih adil antar wilayah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih dalam bagaimana Program Pemberdayaan Rukun Warga berperan dalam optimalisasi infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole Sukabumi. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan, partisipasi, serta dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi warga. Maka dari itu, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dalam Optimalisasi Infrastruktur Lingkungan (*Participatory Action Research* di Kecamatan Cikole Sukabumi)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) berperan dalam mengoptimalkan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi melalui proses

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan. Berdasarkan fokus tersebut, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan warga dalam pelaksanaan Program P2RW melalui pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole Sukabumi?
2. Bagaimana kapasitas organisasi RW dalam mengelola Program P2RW di Kecamatan Cikole Sukabumi?
3. Bagaimana hasil program P2RW dapat mengoptimalkan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan warga dalam pelaksanaan Program P2RW melalui pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole Sukabumi.
2. Untuk mengetahui kapasitas organisasi RW dalam mengelola Program P2RW di Kecamatan Cikole Sukabumi.
3. Untuk mengetahui hasil program P2RW dapat mengoptimalkan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Cikole Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang teori pemberdayaan dalam konteks

pembangunan masyarakat perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), penelitian ini memperkaya pemahaman ilmiah mengenai bagaimana proses pemberdayaan berjalan secara partisipatif dan transformatif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkuat relevansi teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh (Rappaport, 1987) yang menekankan pentingnya kontrol masyarakat terhadap sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya, serta teori (Ife, J. W., & Tesoriero, F., 2008) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas lokal dan partisipasi setara dalam pembangunan. Melalui integrasi dua teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang berorientasi pada optimalisasi infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, terutama mata kuliah Teori Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat, karena penelitian ini membahas dinamika pemberdayaan dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas. Penelitian ini juga relevan dengan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan, sebab membahas implementasi program pemerintah daerah (P2RW) dalam konteks perencanaan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RW. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi kontribusi

akademik dalam memperkaya wacana teoritis dan praktik pembangunan masyarakat melalui model pemberdayaan partisipatif yang mendukung optimalisasi infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan teori pemberdayaan masyarakat dan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam konteks pembangunan infrastruktur lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman empiris dalam menganalisis dinamika sosial dan proses partisipatif di tingkat Rukun Warga.

b) Bagi Instansi

Bagi Pemerintah Kecamatan Cikole dan pelaksana Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian diharapkan mampu membantu instansi dalam mengoptimalkan strategi kolaboratif dan partisipatif guna memperkuat pembangunan infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan semangat partisipatif masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan infrastruktur lingkungan di wilayahnya. Dengan

adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih berdaya, memiliki rasa tanggung jawab kolektif, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, sehat, dan sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

Program merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hasibuan (2011), program menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan terarah. Dalam penelitian ini, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan berbasis kebutuhan warga.

Pemberdayaan masyarakat menurut Rappaport (1987) merupakan proses di mana individu, kelompok, dan komunitas memperoleh penguasaan (mastery) terhadap persoalan yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, serta melaksanakan tindakan untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan terlihat melalui partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan melalui Program P2RW.

Optimalisasi menurut Siagian (2010) merupakan upaya untuk memperoleh hasil yang terbaik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Optimalisasi menunjukkan tingkat

keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Dalam penelitian ini, optimalisasi infrastruktur lingkungan dianalisis melalui indikator efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Infrastruktur lingkungan merupakan sarana dan prasarana dasar yang mendukung aktivitas masyarakat serta kualitas lingkungan permukiman. Infrastruktur lingkungan meliputi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya yang berfungsi meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, infrastruktur yang menjadi fokus utama adalah pembangunan jalan gang sebagai kebutuhan prioritas masyarakat di tingkat RW.

Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan penelitian yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses perubahan sosial. Menurut Kemmis dan McTaggart (1988), PAR dilakukan melalui proses partisipatif yang mencakup identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, dan evaluasi secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, pendekatan PAR digunakan untuk memahami proses pemberdayaan masyarakat melalui tahapan *to know*, *to understand*, *to plan*, *to act*, dan *to change* dalam pelaksanaan Program P2RW.

Secara konseptual, teori-teori tersebut saling berkaitan dalam penelitian mengenai Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Pemberdayaan menjadi landasan utama yang mendorong partisipasi dan kemandirian

masyarakat, optimalisasi berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program, sementara infrastruktur lingkungan merupakan objek sekaligus hasil dari proses pemberdayaan tersebut. Melalui sinergi antara pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan program, dan pembangunan infrastruktur lingkungan yang partisipatif, Program P2RW diharapkan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan masyarakat lokal.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Mayawati Atas No.16, Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini berdasar pada pertimbangan bahwa Kecamatan Cikole merupakan salah satu wilayah yang aktif melaksanakan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan. Kecamatan ini juga memiliki karakteristik sosial masyarakat yang heterogen, serta tingkat partisipasi warga yang beragam dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas.

Secara ilmiah, Jalan Mayawati dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merepresentasikan dinamika nyata pelaksanaan P2RW, baik dari segi keberhasilan maupun tantangannya. Di kawasan ini terdapat beberapa RW yang menunjukkan variasi tingkat partisipasi

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi studi kasus yang kaya untuk mengkaji optimalisasi infrastruktur lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan. Selain itu, lokasi ini mudah dijangkau untuk observasi lapangan dan memiliki data administratif yang lengkap, memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi empiris yang valid dan komprehensif dalam mendukung analisis penelitian.

2. Paradigma Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu perspektif yang berpendapat bahwa realitas sosial terbentuk melalui pengalaman, interaksi, serta makna yang dibangun oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam dari perspektif partisipan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi proses, makna, dan dinamika partisipasi masyarakat serta pemerintah dalam pelaksanaan P2RW, bukan untuk menggeneralisasi temuan, tetapi untuk memahami konteks sosial secara lebih komprehensif.

Dengan menggabungkan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menangkap realitas sosial secara utuh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses

pemberdayaan dan optimalisasi infrastruktur lingkungan secara partisipatif dan reflektif, sesuai dengan pengalaman serta perspektif para pelaku yang terlibat.

3. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan kualitatif. Menurut pandangan Moleong (2017), penelitian kualitatif adalah suatu proses yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ungkapan tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang sedang diamati (Moleong, 2017). Metode ini dipilih karena sesuai dengan sasaran penelitian, yang bertujuan untuk meresapi lebih dalam proses pemberdayaan komunitas dalam pengoptimalan infrastruktur lingkungan melalui partisipasi langsung dari masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan metode *Participatory Action Research* (PAR) merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan guna mengidentifikasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara partisipatif (Septianti, 2021). Metode ini dipilih karena melibatkan pemikiran langsung dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Keterlibatan tersebut memungkinkan terciptanya keberlanjutan program meskipun peneliti tidak lagi mendampingi, sehingga solusi yang dihasilkan dapat terus diterapkan secara mandiri dalam kegiatan masyarakat atau usaha. (Achadiyah, 2019).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini berupa informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata, kalimat, maupun narasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kualitatif dipakai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan proses pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program P2RW dalam optimalisasi infrastruktur lingkungan.

b) Sumber Data

1) Data Primer

Data primer didapat secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di wilayah Kecamatan Cikole. Narasumber utama meliputi Camat Cikole, Ketua Rukun Warga (RW) pelaksana program P2RW, tokoh masyarakat, serta warga yang menjadi penerima manfaat program. Data primer ini dipakai guna menggambarkan secara langsung pengalaman, pandangan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, juga untuk memahami dinamika sosial yang terjadi selama proses pemberdayaan berlangsung.

2) Data Sekunder

Data sekunder didapat dari berbagai sumber tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen resmi program P2RW yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, laporan kegiatan dan hasil evaluasi program dari pihak kecamatan maupun kelurahan, serta literatur ilmiah seperti buku, jurnal penelitian, dan arsip terkait teori pemberdayaan masyarakat, optimalisasi infrastruktur, dan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis penelitian, memberikan dasar teoritis terhadap temuan lapangan, serta membantu peneliti menafsirkan data primer secara lebih kontekstual dan mendalam.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

a) Informan dan Unit Analisis

Informan dan unit analisis memainkan peranan yang krusial sebagai sumber informasi bagi peneliti. Berdasarkan Sugiyono (2018), informan atau sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti dan dapat menyampaikan informasi yang relevan dengan konteks serta situasi lapangan penelitian adalah referensi utama dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2018). Informan adalah individu yang sanggup memberikan penjelasan yang mendalam, terperinci, dan komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti untuk tujuan pengumpulan data penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Pihak Pemerintah Kecamatan Cikole (Camat Cikole yaitu Pak Caesar dan Staf Pelaksana P2RW sekaligus Sekretaris Camat yaitu Pak Fajar),
- 2) Ketua RW penerima program P2RW (Pak Suherman selaku Ketua RW 01 Kelurahan Selabatu)
- 3) Warga penerima manfaat program yaitu bu Dewi.

Unit analisis penelitian ini adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui program P2RW dalam upaya optimalisasi infrastruktur lingkungan.

b) Teknik Penentuan Informan

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik ini merupakan metode memilih sumber data berdasarkan kriteria. Salah satu alasan untuk mempertimbangkan hal ini dapat berupa keyakinan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan paling mendalam tentang subjek penelitian atau bahwa mereka berada dalam posisi strategis yang dapat membantu peneliti memahami konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2015), Sugiyono (2015) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel tidak disebut sebagai responden; sebaliknya, mereka disebut narasumber atau informan. Teknik penentuan informan dilaksanakan dengan metode purposive sampling, yaitu

pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sejalan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Menurut Sugiyono (2010:145), mengatakan bahwa observasi adalah proses yang kompleks yang terdiri dari banyak elemen biologis dan psikologis dan melibatkan mengamati dan mengingat secara teratur dan sistematis. Observasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menangkap perubahan perilaku, kolaborasi, dan respons masyarakat selama proses pemberdayaan berlangsung, sesuai dengan prinsip *Participatory Action Research* (PAR) yang mendorong partisipasi atau keterlibatan aktif peneliti bersama masyarakat dalam proses perubahan sosial.

b) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Pendapat Sugiyono (2015), wawancara dapat diartikan sebagai sebuah pertemuan antara beberapa individu yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai suatu topik. Untuk itu, teknik wawancara dilakukan dengan format semi-terstruktur agar peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang lebih komprehensif sambil tetap menjaga fokus penelitian.

c) Dokumentasi

Sugiyono (2020) menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi melalui pencatatan beragam kejadian yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, foto, ataupun jenis arsip lainnya. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta menjadi alat triangulasi untuk meningkatkan keandalan dan keaslian data penelitian.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan empat kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* sebagaimana yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba (1985).

Teknik yang digunakan meliputi:

- a) Triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b) Member check, yang merupakan konfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan bahwa data itu benar.
- c) Peer debriefing, berdiskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing untuk mendapatkan pandangan objektif tentang hasil penelitian (Lincoln dan Guba, 1985).

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam studi ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

- a) Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data dari observasi, dokumentasi, dan wawancara supaya sesuai dengan fokus dari penelitian. Menurut Sugiyono (2018:247–249), reduksi data adalah suatu metode memudahkan data dengan merangkum dan memilih elemen-elemen yang penting. Proses ini juga menekankan pada pilihan elemen relevan yang terkait dengan penelitian tersebut.
- b) Penyajian Data (*Data Display*), setelah tahap reduksi selesai, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data berlangsung setelah reduksi dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui diagram alir, tabel, ringkasan, atau diagram relasi antar kategori. Namun, penyajian dalam bentuk naratif adalah yang paling umum digunakan. Pada tahap ini, data menjadi lebih terorganisir dan terstruktur, sehingga mempermudah peneliti untuk memahami serta menganalisis hasil penelitian (Sugiyono, 2018).
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), adalah proses memberikan interpretasi atas data guna menemukan makna serta hubungan antara hasil yang

diperoleh dalam penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data kualitatif. Sugiyono (2018) mengatakan bahwa kesimpulan dapat menjawab pertanyaan awal, tetapi juga dapat berkembang dari hasil yang didapat di lapangan. Hasil akhir merupakan temuan baru yang memberikan kejelasan atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang sebelumnya belum sepenuhnya jelas (Miles dan Huberman, 1994).

